

Alasan Korea Selatan Menolak Bergabung Dalam *Trilateral Military Alliance* Bersama Amerika Serikat Dan Jepang

Hasri Ainun Hakiem (20140510015)

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

hasriainun1009@gmail.com

Abstract

Korean Peninsula crisis has been occurring since 1950s. Until now, the crisis of the two Koreas keep going as the North keeps doing any efforts that leads to escalate the conflict. The targets of their nuclear weapon are the United States (U.S.) and their allies which are South Korea and Japan. In 2017, U.S. initiated trilateral military alliance with its allies which aims at countering North Korea's nuclear and missile provocation. But surprisingly, South Korea stated that they do not want to join trilateral military alliance with U.S. and Japan. South Korea's domestic politic condition and pressure from China regarding this issue are probably the reasons why South Korea chose to refuse to join the alliance.

Keywords: South Korea, Trilateral Military Alliance, U.S., Japan, China

Keamanan merupakan syarat penting bagi suatu negara agar dapat disebut sebagai negara berdaulat. Tanpa adanya rasa aman, akan sulit bagi suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, semua negara berusaha untuk menciptakan keamanan bagi negaranya. Terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, muncul kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang di masa yang akan datang. Tidak terkecuali bagi Korea Selatan, pasca gencatan senjata yang menandai terpisahnya dua Korea di tahun 1953, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara belum membaik. Kedua negara ini masih saling bersitegang. Bagi Korea Selatan, Korea Utara menjadi ancaman keamanan yang besar dengan senjata nuklirnya. Ancaman ini tidak hanya berlaku pada Korea Selatan, tetapi juga pada Jepang sebagai dua negara aliansi utama Amerika Serikat (AS).

Menanggapi ancaman senjata nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara, AS merespon dengan mengajukan sebuah usulan untuk membentuk kerjasama militer, yang lebih formal dan dilembagakan, dengan Korea Selatan dan Jepang yang disebut *Trilateral Military Alliance*. Hal ini selain bertujuan sebagai upaya *deterrence* terhadap Pyongyang, juga dilakukan untuk menciptakan keamanan di wilayah Asia Timur. Aliansi yang dimaksudkan adalah bentuk aliansi 3 negara yang terpusat dan dilembagakan.

Dalam hubungan internasional, hubungan trilateral melibatkan tiga entitas yang memiliki tujuan politik yang sama dan visi strategis terhadap tatanan regional maupun internasional. Kerjasama trilateral atau juga disebut trilateralisme seringkali digambarkan lebih besar dari kerjasama bilateral namun merupakan bentuk sederhana dari multilateralisme. (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 3). Trilateralisme kemungkinan akan membawa manfaat

besar bagi masing-masing negara anggota di bidang keamanan. Trilateralisme adalah bentuk multilateral yang paling diminimalisir dan karenanya mewarisi beberapa keuntungan dasar multilateralisme tradisional sambil menghindari masalah-masalah yang paling serius (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 5). Aliansi dapat menghemat biaya dan menggandakan manfaat melalui pembagian tanggung jawab, pembagian aset umum, atau hanya perlindungan yang diberikan dengan memiliki negara yang lebih kuat sebagai sekutu (Tetraisi, 2004, hal. 136).

Meskipun sebuah aliansi dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara yang berpartisipasi, Presiden Moon Jae In membuat pernyataan yang diluar dugaan. Ia dengan tegas menolak ajakan dari AS dan Jepang untuk membentuk *Trilateral Military Alliance*. Dalam wawancaranya bersama *Channel News Asia Singapore*, Presiden Moon Jae In menyatakan,

"South Korea-U.S. military cooperation as well as Japan has become important, but the cooperation is aimed at countering North Korea's nuclear and missile provocations. But I do not think it is appropriate to develop the cooperation to a level of (trilateral) military alliance." (Yonhap News, 2017)

Moon juga menyatakan bahwa AS memang sekutu Korea Selatan, tetapi tidak dengan Jepang, selanjutnya ia menambahkan,

"For (South) Korea, the alliance with the US is more important than anything in safeguarding our security. In particular, cooperation between Korea and the US is essential to resolve the North Korean nuclear issue. Therefore, we need to maintain the traditional stance of laying great importance on the bilateral relations with the US." (Lim, 2017)

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai sebab-sebab penolakan Korea Selatan untuk bergabung dalam *trilateral military alliance* bersama AS dan Jepang.

A. Keuntungan Trilateralisme dan Aliansi Militer

Dr. Sangit Sarita mengutip pendapat dari Arnold Wolfer mendefinisikan aliansi sebagai janji bantuan militer bersama antara dua atau lebih negara yang berdaulat. Aliansi memainkan peran sentral dalam hubungan internasional karena mereka dipandang sebagai bagian integral dari kenegaraan. Aliansi terbentuk antara dua atau lebih negara untuk melawan musuh bersama. Negara-negara lemah masuk ke dalam aliansi ketika mereka membutuhkan perlindungan terhadap negara-negara yang kuat, mereka masuk ke dalam aliansi untuk membela diri. Negara-negara kuat masuk ke dalam aliansi untuk melawan negara-negara kuat lainnya. Negara mengharapkan sekutunya untuk membantu secara militer dan diplomatik selama masa konflik (Dwivedi, 2012, hal. 1-2).

Manfaat utama dari aliansi jelas adalah keamanan, tetapi banyak manfaat non-keamanan juga bisa didapatkan dari aliansi. Manfaat keamanan dalam aliansi pertahanan bersama termasuk kemungkinan yang lebih rendah untuk diserang (*deterrence*), memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hal serangan (pertahanan) dan pencegahan terbentuknya aliansi antara sekutu dengan musuh seseorang (*preclusion*). Aliansi memberikan peningkatan substansial dengan cepat. Meningkatkan kemampuan militer sendiri akan memakan waktu yang cukup lama, sementara aliansi menjadi pilihan yang dapat diandalkan (Chun, 2000, hal. 76).

Trilateralisme antara AS, Korea Selatan, dan Jepang merupakan pendekatan yang diperlukan dan efektif untuk mengatasi banyak tantangan tradisional dan non-tradisional di dalam dan di luar Asia. Inisiatif-inisiatif trilateral paling berhasil ketika mereka didasarkan pada perlawanan terhadap ancaman bersama dan mempromosikan kepentingan bersama yang konkret, daripada dilakukan hanya

demokrasi tiga negara melakukan sesuatu bersama (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 2).

Nilai intrinsik dari hubungan trilateral sebagai bentuk kerja sama regional yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang berpartisipasi. Muhui Zhang berpendapat bahwa karena jumlah mitra koperasi yang relatif kecil, minilateralisme dikenal luas karena efisiensi, mengingat bahwa komplikasi dan biaya transaksi diharapkan sebanding dengan jumlah aktor yang terlibat dalam pengaturan multilateral. Bukan merupakan hal yang aneh bagi negara-negara anggota dengan kepentingan yang sangat berbeda memutuskan untuk menghentikan kerjasama multilateral dengan alasan tingginya beban birokrasi dan biaya administrasi (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 5). Trilateralisme juga menawarkan banyak manfaat yang sama dengan multilateralisme tradisional. Di tempat pertama, memastikan aliran komunikasi yang stabil dan efektif dengan melembagakan titik kontak untuk mitra. Kerjasama trilateral juga memfasilitasi perencanaan kebijakan jangka panjang dan memperkuat pembangunan institusi di antara negara-negara yang terlibat.

Setelah trilateralisme perlu juga dibahas mengenai pentingnya sebuah aliansi militer. Hal ini untuk memfokuskan pembahasan tidak hanya pada keuntungan aliansi, tetapi pada aliansi militer yang direncanakan untuk dibentuk oleh AS. Manfaat yang dirasakan dari bergabung dengan aliansi militer formal adalah keyakinan bahwa karena bentuk pertahanan kolektif semacam itu meningkatkan keamanan dengan menyediakan komitmen formal militer dan elemen-elemen kekuatan nasional lainnya di antara para signatoris, aliansi tersebut menghalangi tindakan musuh-musuh potensial (Cook, 2013, hal. 561). Dalam kasus AS, Korea

Selatan dan Jepang, musuh potensial yang dimaksud adalah Korea Utara atas ancaman bagi kestabilan dan keamanan wilayah Asia Timur.

Ada juga dimensi simbolis untuk aliansi formal, yang secara ringkas ditangkap oleh mantan Menteri Luar Negeri Madeline Albright ketika dia menyatakan bahwa NATO adalah ekspresi dari hubungan transatlantik yang sangat diperlukan. Advokat aliansi percaya bahwa perjanjian resmi ini mempromosikan perdamaian dan menghindari perang. Manfaat lain dari aliansi militer seperti yang juga disinggung sebelumnya adalah bahwa mereka memfasilitasi pembagian beban antara anggota. Misalnya, NATO menjalankan Pasal 5 dari Perjanjian Washington setelah serangan teroris pada 9/11 dan kemudian melakukan pasukan militer ke Afghanistan dalam operasi "di luar wilayah" pertamanya. Keterlibatan aliansi memungkinkan pembentukan *International Security Assistance Force Afghanistan (ISAF)* yang akhirnya tumbuh hingga beranggotakan 50 negara. Pada Februari 2013, ada lebih dari 100.000 pasukan ISAF yang bertugas di Afghanistan. Sebuah aliansi menawarkan persepsi yang lebih besar tentang "legitimasi" dalam sistem internasional, terutama bila dibandingkan dengan tindakan sepihak oleh satu negara — tidak peduli seberapa besar atau kuatnya. Aliansi juga menawarkan akses geostrategis (yaitu, mendasarkan hak, izin penerbangan, dll.) ke area utama di mana kepentingan nasional dipertaruhkan. (Cook, 2013, hal. 563).

Kembali pada *trilateral military alliance*, apabila Korea Selatan tergabung dalam aliansi militer ini, maka akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Kombinasi manfaat trilateralisme yang “memudahkan” dan aliansi militer yang memberikan kekuatan serta faktor *deterrence*, ditambah dengan faktor adanya kesamaan tujuan antara AS, Korea Selatan dan Jepang dimana ketiganya

menginginkan terciptanya perdamaian di wilayah Asia Timur. Maka pembentukan aliansi ini menjadi patut untuk dipertimbangkan.

B. Politik Domestik Korea Selatan di Masa Pemerintahan Moon Jae In

Korea Selatan memiliki Presiden baru yang diangkat Mei 2017 lalu menggantikan Park Geun Hye. Moon Jae In, dari Partai Demokrat yang liberal menang dengan memperoleh 41.1% suara (Mosler, 2017, hal. 1). Moon Jae In merupakan President pertama yang terpilih dari partai liberal setelah kurang lebih satu dekade Korea Selatan dipimpin oleh partai konservatif.

Ketika terpilih menjadi Presiden, Moon Jae In telah dihadapkan dengan serangkaian tantangan baik secara domestik maupun internasional. Kemenangan Moon didukung oleh keberhasilannya menarik perhatian masyarakat Korea Selatan yang meminta kepada calon Presiden untuk berfokus pada isu domestik, terutama isu korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran khususnya bagi pemuda dan besarnya pengaruh politik yang diberikan oleh konglomerat di Korea Selatan (Altbach, 2017, hal. 1).

Mengenai pandangan masyarakat Korea Selatan tentang Korea Utara, dilansir oleh Asan Public Opinion Report, pandangan mengenai reunifikasi dengan Korea Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan image Korea Utara yang awalnya negatif dimana masyarakat memandang negara tersebut sebagai ancaman dan perlu selesai dengan cara yang *hardcore*. Kini berangsur-angsur menjadi lebih positif. Masyarakat juga mendukung upaya reunifikasi dan menyebutkan bahwa reunifikasi adalah tujuan utama bagi Korea Selatan saat ini.

Banyak hal yang melatarbelakangi keinginan reunifikasi dengan Korea Utara, sebesar 33.3% menyatakan untuk pertumbuhan ekonomi dan 28.7% untuk

menghentikan ancaman perang. Selain itu beberapa dari mereka juga memilih untuk reunifikasi karena dianggap dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan sendiri, serta menghadirkan kedamaian di wilayah Asia Timur (Miller, 2018).

Hal ini berbanding terbalik dengan opini masyarakat mengenai AS. Asan Public Report melansir, yang awalnya positif berubah menjadi negatif dimulai dari masa pemerintahan Roh Moo Hyun hingga Moon Jae In saat ini masyarakat mulai melihat AS justru sebagai hambatan bahkan ancaman bagi Korea Selatan. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan untuk reunifikasi. AS dianggap tidak bisa membantu Seoul untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pyongyang.

Berbeda dengan Korea Utara dan AS, hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang selalu dibayang-bayangi oleh pengalaman kelam di masa lalu. Luka mengenai kejamnya kolonisasi Jepang di Korea Selatan sulit dihapuskan oleh masyarakat Korea. Mereka masih memandang bahwa Jepang adalah negara yang kejam, mereka masih menuntut permohonan maaf yang resmi dari pemerintahan Jepang terhadap korban-korban *comfort women*.

Berbagai demonstrasi dan penolakan terhadap instalasi THAAD di Seongju, upaya normalisasi dengan Jepang, serta *blow up* media mengenai survey-survey yang dilakukan banyak institusi dilakukan untuk menunjukkan pada publik suara dari masyarakat Korea Selatan.

Di sisi lain, Partai Demokrat (*Minjoo Party*), tempat Moon Jae In bernaung, telah dikenal sejak lama memang menentang instalasi THAAD sejak awal dan lebih memilih perbaikan hubungan dengan Korea Utara melalui jalur damai dan negosiasi. Kini Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu yang juga memiliki

jumlah kursi terbanyak di parlemen, sehingga keputusan dan persetujuan parlemen akan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok ini (Time, 2016). Parlemen kubu Moon juga menyatakan keinginannya untuk membuka kembali Kaesong Industrial Complex (KIC) dan kembali menjalankan *Sunshine Policy* yang telah dihentikan selama 2 periode (Mosler, 2017, hal. 10).

Walau bagaimanapun, hal ini tidak menandakan penarikan dari posisi sekutu negara dengan AS. Sebaliknya, administrasi Moon terus melihat Washington sebagai penjamin paling penting dari keamanan negara. Pada saat yang sama, akan lebih banyak otonomi bagi Korea Selatan untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan ini. Dengan demikian mencari kemitraan di antara yang sederajat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan, akhirnya, meninggalkannya (Mosler, 2017, hal. 11).

Apabila membahas mengenai kerjasama antara Korea Selatan dengan Jepang, pembahasan ini selalu kompleks. Tantangan yang paling sering dikutip untuk koordinasi kebijakan trilateral yang efektif adalah hubungan yang sulit antara Seoul dan Tokyo (Smith, 2017, hal. 11). Para ahli berpendapat bahwa, kerjasama kedua negara ini hanyalah dalam aspek kerjasama ekonomi karena keduanya merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi di Asia Timur. Tetapi akan sulit bagi keduanya untuk memperluas kerjasama ini ke bidang lain seperti politik maupun militer. Harapan mengenai kemajuan kerjasama antar keduanya sangat tipis.

Sentimen Korea Selatan untuk memiliki militer Jepang di tanah Korea terus membatasi integrasi penuh perencanaan aliansi militer. Menjaga agar ketiga negara selaras saat diplomasi berlangsung akan menjadi sulit (Smith, 2017, hal. 11-12).

C. Pengaruh Politik Eksternal

Tidak hanya faktor domestik, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi sebuah proses pengambilan kebijakan. Faktor politik internasional yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pembentukan *trilateral military alliance* ditujukan untuk menghadapi ancaman bersama bagi AS, Korea Selatan dan Jepang yaitu ancaman senjata nuklir dari Korea Utara, ancaman yang terus mengintai sejak berakhirnya perang dingin.

Seperti yang telah disampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa upaya pembentukan *trilateral military alliance* telah ada sejak tahun 1990an dan seiring berjalannya waktu kedekatan antar tiga negara tersebut semakin meningkat. Menyadari adanya peningkatan hubungan antara Korea Selatan-AS-Jepang, Beijing mulai merasa tidak nyaman, ditambah lagi dengan upaya pembentukan aliansi militer antar ketiga negara tersebut. RRT menganggap *trilateral military alliance* justru akan membawa instabilitas keamanan di wilayah Asia Timur (Easley, 2017). Sejak 1990-an, RRT telah khawatir bahwa AS ingin membentuk aliansi seperti NATO di depan pintunya (Perlez, 2017).

Sebelumnya, AS dan Korea Selatan telah melakukan pertimbangan mengenai cara untuk menghadapi ancaman nuklir tersebut. Salah satu cara yang ditempuh oleh kedua negara ini adalah dengan instalasi *Terminal High Altitude Area Defense* atau biasa disebut THAAD. Kemudian ditambah lagi dengan disepakatinya perjanjian *Trilateral Information Sharing Agreement (TISA)* untuk berbagi informasi antar intelijen yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Tetapi hal tersebut merupakan langkah yang berbahaya di mata Beijing, karena itu dapat merajut Tokyo dan Seoul lebih dekat dalam kerja sama militer. Maka kemungkinan

besar lainnya yang muncul adalah aliansi militer antar Korea Selatan-AS-Jepang benar-benar terbentuk. Song Zhongping, seorang analis militer berbasis di RRT secara lebih jelas menyampaikan,

"This could mean a three-party alliance, rather than two-sided alliances [of the US and Japan, and the US and South Korea], and this would pose a damaging threat to the stability of Northeast Asia," (Zhou, 2016)

Mantan Mayor Jendral *People's Liberation Army* di RRT, Xu Guanyu, menyatakan apabila aliansi antara Korea Selatan, AS dan Jepang terbentuk maka hal tidak memberi para pemimpin RRT pilihan lain selain bersandar ke aliansi Beijing-Moskow sebagai upaya *counterbalance*. Tetapi dikhawatirkan hal ini akan memicu perlombaan senjata di Asia Timur (Zhou, 2016).

Sejak munculnya kekhawatiran itu, RRT belum mendapatkan momentum yang tepat untuk mencegah terbentuknya *trilateral military alliance*. Beijing perlu memberikan tekanan pada salah satu pihak dan pihak yang paling memungkinkan di mata mereka adalah Korea Selatan (Perlez, 2017).

Setelah TISA, yang RRT kira tidak akan bisa disepakati oleh Korea Selatan dan Jepang, di masa kepemimpinan Presiden Park Geun Hye, Korea Selatan kerap menolak usulan dari AS untuk memasang sistem anti-rudal berteknologi tinggi yang lebih efektif dan menggabungkan sistem independennya ke dalam jaringan gabungan yang komprehensif (Klinger, *The Importance of THAAD Missile Defense*, 2015, hal. 22). Rencana pemasangan THAAD di Korea Selatan pun menjadi momentum bagi RRT. Banyak kontroversi terkait dengan penolakan instalasi THAAD serta adanya tekanan dari RRT.

RRT yang menentang hal ini—serta kekhawatiran akan terbentuknya kerjasama lain yang lebih besar—memberikan sanksi *unofficial* kepada Korea Selatan dalam beberapa aspek yaitu sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik. Beberapa pertemuan antar pejabat pemerintah dibatalkan secara sepihak. Dari bidang ekonomi, RRT memboikot industri hiburan, ekspor-impor barang dan jasa serta pariwisata Korea Selatan (Easley, 2017). Beberapa acara yang menampilkan musik pop Korea Selatan (K-pop) dan aktor ditangguhkan atau dibatalkan tanpa penjelasan. China Central Television (CCTV), saluran TV milik negara, melaporkan bahwa regulator siaran pemerintah memiliki melarang penayangan acara TV Korea Selatan. Sejak Juli 2016, RRT memblokir akses barang dan jasa dari Korea Selatan. Pada bulan Maret 2017, Regulator RRT melarang penjualan beberapa produk Korea Selatan, termasuk jenis pembersih udara tertentu, kursi toilet berteknologi tinggi, dan kosmetik, dengan alasan keamanan. RRT juga melarang kunjungan wisata ke Korea Selatan. Hingga di tahun 2017 angka wisatawan yang masuk ke Korea Selatan turun hingga 66% karena memang mayoritas wisatawan datang dari negeri Tirai Bambu tersebut (Meick & Salidjanova, 2017, hal. 7). Akibatnya hubungan ekonomi kedua negara terganggu dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Korea Selatan.

Setelah diturunkannya Presiden Park Geun Hye, Presiden terpilih Moon Jae In, disebut-sebut menjadi harapan baru bagi warga Korea Selatan terutama untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara serta mengatasi masalah dengan RRT. Tidak lama setelah terpilih menjadi Presiden pada bulan Mei 2017, Moon Jae In menghubungi Presiden RRT, Xi Jinping. Keduanya sepakat untuk melakukan pertemuan sesegera mungkin (Panda, 2017).

Setelah terpilihnya Presiden Moon Jae In, RRT mulai menunjukkan perubahan sikap atas Korea Selatan, kemurkaan ekonomi RRT tampak mulai mengalami penurunan tensi. Meskipun hampir seluruh *store* Lotte masih ditutup, namun pertunjukan musik Korea Selatan atau *K-Pop (korean Pop)* mulai dilaksanakan kembali pada bulan Juni. Maskapai penerbangan RRT, Spring Airline, mulai menjadwalkan ulang penerbangan menuju Korea Selatan atas kembalinya turis-turis RRT yang melakukan perjalanan ke negeri ginseng tersebut (Meick & Salidjanova, 2017, hal. 8).

Moon Jae In bertemu pertama kali dengan Xi Jinping pada bulan Juli pada *G20 Summit* di Jerman. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Namun, ia masih terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan RRT. Dalam *APEC Summit* yang dilaksanakan di Da Nang, Vietnam, Moon Jae In kembali dijadwalkan untuk bertemu dengan Xi Jinping. Di pertemuan kali ini, ia berfokus pada peningkatan dan normalisasi kerjasama ekonomi antar dua negara. Moon juga mengajak RRT untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemberian sanksi terhadap nuklir Korea Utara. Hal ini dikarenakan kedekatan antara RRT dan Korea Utara. Beijing juga sebelumnya telah menyatakan menolak pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan meminta Pyongyang untuk denuklirisasi (Dong-A Ilbo, 2017).

Pada bulan Desember 2017, Moon Jae In melakukan kunjungan pertamanya ke RRT dan pertemuan ketiganya dengan Xi Jinping. Dikutip dalam wawancara *South China Morning Post*, Moon Jae In menyebutkan bahwa tujuan utama dalam kunjungan ini adalah untuk membangun kembali kepercayaan antar kedua negara sebagaimana yang telah terjalin selama 25 tahun terakhir. Dalam pertemuan ini juga

sempat dibahas mengenai THAAD. Kedua pemimpin berbicara *heart to heart* mengenai pandangannya akan masalah ini. Disebutkan bahwa Beijing memahami tujuan dipasangnya sistem pertahanan anti rudal tersebut dan yakin bahwa sistem yang terpasang saat ini memang tidak diarahkan untuk RRT (Weibing, 2017).

Tetapi, kekhawatiran lainnya bagi RRT tetap ada, yakni kemungkinan dibentuknya sistem lain mirip THAAD yang digunakan oleh Korea Selatan, AS dan Jepang untuk “memata-matai” RRT (Perlez, 2017). Oleh karena itu, RRT sepakat untuk melakukan perbaikan ekonomi dan mencabut sanksinya asalkan Korea Selatan mampu memenuhi 3 syarat. Beijing kemudian menawarkan perjanjian baru yang disebut sebagai *three nos*:

1. tidak ada tambahan instalasi THAAD di Korea Selatan (dalam hal ini tambahan yang dimaksud ialah baterai maupun *launcher*);
2. tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal strategis bersama AS;
3. tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral Korea Selatan-AS-Jepang (Panda, 2017).

Menanggapi penawaran ini, Korea Selatan menyatakan secara publik untuk patuh terhadap *three nos* (Abrahamian & Son, 2017). Setelah pernyataan tersebut dan mulai menjaga jarak dengan AS maupun Jepang. Keputusan Moon tersebut tidak disukai oleh AS, Korea Selatan dianggap telah menyerah dengan berbagai tekanan dan gertakan dari RRT. Tetapi, keputusan ini kemudian didukung dengan sikap Moon Jae In yang dalam sebuah interview dengan *News Asia Singapore* menyatakan,

"South Korea-U.S. military cooperation as well as Japan has become important, but the cooperation is aimed at countering North Korea's

nuclear and missile provocations. But I don't think it is appropriate to develop the cooperation to a level of (trilateral) military alliance."

(Yonhap News, 2017)

Berdasarkan pada upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Moon untuk memperbaiki hubungan dengan RRT, setelah pertemuan kedua kepala negara, Moon Jae In dan Xi Jinping pada Desember 2017, sanksi yang diberikan RRT mulai melonggar.

Dapat diamati bahwa instalasi THAAD kemudian menjadi momentum bagi RRT untuk mencegah terbentuknya aliansi bagi Korea Selatan, AS dan Jepang (Perlez, 2017). Meskipun pada akhirnya THAAD tetap dipasang di Korea Selatan atas pengertian dari RRT, tetapi baterai yang sudah terinstal disana tidak akan bertambah sesuai dengan perjanjian *three nos* yang telah disepakati.

Melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Moon Jae In untuk memperbaiki hubungan negaranya dengan RRT, beberapa pengamat mengaitkan hal ini dengan posisi RRT terhadap Korea Selatan. Seperti yang dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa kondisi domestik Korea Selatan lebih menginginkan adanya perbaikan hubungan dengan Korea Utara, maka hal ini menjadi perhatian bagi pemerintahan Moon Jae In. Korea Selatan menganggap bahwa RRT adalah salah satu negara yang “dekat” dengan Korea Utara. Ditambah lagi dengan pernyataan Beijing bahwa mereka juga sepakat terhadap denuklialisasi Pyongyang hal ini dianggap sebagai sebuah peluang bagi Seoul untuk membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan dan menghentikan uji coba nuklirnya. Perwakilan dari *Blue House* menyatakan,

“Coming amid a thaw in South Korea-China relations, [the remarks] are significant in pressing China to emphasize its role and show a more active attitude on resolving the North Korean nuclear issue,” (Seong, 2017)

Pada bulan Desember lalu, Korea Selatan dan RRT menyepakati empat prinsip untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, yang terdiri dari 1) perang di Semenanjung Korea tidak dapat ditoleransi; 2) prinsip denuklirisasi Semenanjung Korea akan dipelihara dengan baik; 3) semua masalah, termasuk denuklirisasi Korea Utara, akan diselesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi; dan 4) peningkatan hubungan antar-Korea akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan Semenanjung Korea (McGuire, 2018). Melihat sikap dari Korea Selatan yang menyepakati perjanjian *three nos* bersama RRT, maka dapat dikatakan bahwa akan sulit bagi *trilateral military alliance* untuk terbentuk antara Korea Selatan-AS-Jepang (Park, 2017).

D. Kesimpulan

Keamanan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh suatu negara agar bisa dikatakan sebagai negara berdaulat. Definisi dari keamanan itu sendiri memang cukup luas, namun secara garis besar keamanan bagi suatu negara bisa dikatakan ketika tidak adanya ancaman yang dapat mengganggu aktivitas roda pemerintahan, baik domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia berupaya untuk menciptakan keamanan di negaranya melalui berbagai cara. Hal ini tidak terkecuali bagi Korea Selatan. Setelah menjadi korban Perang Korea yang terjadi dari tahun 1950-1953, ancaman keamanan selalu menghantui negara ini.

Sejak berakhirnya perang dingin, Pyongyang secara konstan memberikan ancaman kepada Korea Selatan terkait uji coba nuklir yang bisa saja ditujukan ke wilayah Korea Selatan. Tidak hanya Korea Selatan, tetapi sekutunya Amerika Serikat (AS) bersama Jepang juga menjadi target Korea Utara.

Menghadapi ancaman Korea Utara yang semakin besar, AS mengusung sebuah ide untuk membentuk *Trilateral Military Alliance*, sebuah aliansi antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang terintegrasi dan terlembagakan karena ketiga negara berbagi tujuan yang sama yaitu denuklirisasi Korea Utara. Aliansi ini dapat membawa keuntungan bagi negara anggotanya, dimana ketiganya dapat menghemat biaya kerjasama, adanya *sharing burden*, efektifitas dari minilateralisme, serta efek *deterrence* bagi Korea Utara apabila mereka benar-benar akan memecah perang. Namun, Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae In memilih untuk menolak bergabung dalam aliansi militer tersebut.

Penolakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat Korea Selatan meminta kepada pemerintah untuk berfokus pada urusan domestik. Melalui berbagai demonstrasi dan survey-survey yang dipublikasikan di media massa, masyarakat menyuarakan pendapatnya mengenai sikap yang perlu diambil pemerintah. Masyarakat lebih menyetujui apabila pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Pandangan negatif tentang Korea Utara sudah banyak berubah. Dari awalnya dianggap sebagai ancaman militer, Korea Utara kini dianggap sebagai saudara oleh masyarakat.

Sebaliknya, pandangan positif terhadap AS sebagai pelindung Korea Selatan kini mulai memudar, digantikan dengan pandangan bahwa AS adalah sebuah hambatan bagi proses rekonsiliasi semenanjung Korea. Lain halnya dengan Jepang,

sejak berakhirnya kolonialisme Jepang di Korea, pandangan masyarakat terhadapnya tidak banyak berubah. Jepang tetap dianggap sebagai negara yang agresif yang telah memberikan luka mendalam bagi masyarakat.

Partai Demokrat yang mendukung rekonsiliasi dengan Korea Utara menjadi pemenang pemilu dan kini mendominasi kursi parlemen, sehingga kebijakan tersebut jelas menjadi perhatian utama di dalam negeri.

Faktor selanjutnya adalah dari konteks internasional. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian pemerintah Seoul adalah nuklir Korea Utara. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghentikannya. Salah satu kebijakan kontroversial Korea Selatan adalah dengan instalasi *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* yang bekerjasama dengan AS. Instalasi THAAD ini mendapat respon yang tidak baik, baik domestik maupun internasional. RRT menentang keras kebijakan THAAD dianggap dapat menjangkau wilayah RRT dan Korea Selatan bisa saja “memata-matai” proyek senjata nuklirnya.

RRT kemudian memberikan sanksi *unofficial* kepada Korea Selatan dimana mereka menghentikan ekspor-impor barang dan jasa, melarang pariwisata dan menghentikan penayangan acara yang berasal dari Korea Selatan. Beijing juga memiliki posisi penting bagi Korea Selatan dimana ia diyakini bisa membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan untuk denuklialisasi tanpa jalur militer.

Atas upaya Moon Jae In untuk melakukan perbaikan hubungan dengan RRT, sanksi tersebut mulai melonggar. Tetapi RRT memberikan penawaran berupa perjanjian yang disebut *three nos* yaitu, tidak ada tambahan instalasi THAAD di Korea Selatan (dalam hal ini tambahan yang dimaksud ialah baterai maupun *launcher*); tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal strategis bersama AS;

dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral Korea Selatan-AS-Jepang. Korea Selatan kemudian menyampaikan kepada publik bahwa mereka setuju dan memilih untuk patuh pada *three nos* ini meskipun mendapat kecaman dari AS. Sejak saat itu, Korea Selatan menjaga jarak dengan AS dan Jepang.

Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Korea Selatan menolak untuk bergabung dengan *trilateral military alliance* bersama AS dan Jepang karena adanya pengaruh yang terjadi di politik domestik Korea Selatan serta adanya tekanan dari RRT dan disepakatinya *three nos* oleh Korea Selatan.

Referensi

▪ Jurnal

- Altbach, E. (2017). Moon Jae In Victory Complicates U.S.-ROK Relations. *Albright Stonebridge Group*.
- Abrahamian, A., & Son, D. (2017, November 9). *Moving On: China Resolves THAAD Dispute with South Korea*. Dipetik November 29, 2018, dari 38 North: <https://www.38north.org/2017/11/abrahamianson110917/>
- Chun, C. S. (2000). Theoretical Approaches to Alliance: Implications on the U.S.-ROK Alliance. *Journal of International and Area Studies*.
- Cook, J. (2013). Military Alliances in the 21st Century: Still Relevant After All These Years? *Foreign Policy Research Institute*.
- Dwivedi, S. S. (2012). Alliances in International Relations Theory. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*.
- Klinger, B. (2015). The Importance of THAAD Missile Defense. *The Journal of East Asian Affairs*, 29, 21-41.
- Mosler, H. B. (2017). President Moon Jae In - The Right President Choice for South Korea. *Asia Policy Brief*.
- Smith, S. (2017). South Korea's Diplomatic Options Under Moon Jae In. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*.

Swaine, M. D. (2017). Chinese Views on South Korea's Deployment of THAAD. *China Leadership Monitor*. Dipetik April 10, 2018, dari <http://carnegieendowment.org/files/CLM52MS.pdf>

Tetrais, B. (2004). The Changing Nature of Military Alliance. *The Washington Quarterly*.

▪ **Report**

Kamphausen, R., Park, J., Sahashi, R., & Szwalwinski, A. (2018). The Case For U.S.-ROK-Japan Trilateralism: Strength and Limitation. *The National Bureau of Asian Research*.

▪ **Working Papers**

Shim, D., & Flamm, P. (2012). Rising South Korea: A Minor Player or a Regional Power? *GIGA*.

▪ **Sumber Web**

Aljazeera. (2018, Februari 18). *North Korea's Nuclear Weapons: What We Know*. Dipetik April 8, 2018, dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/05/north-korea-testing-nuclear-weapons-170504072226461.html>

Berlinger, J. (2017, Desember 4). *North Korea's Missile Tests : What You Need To Know*. Dipetik April 8, 2018, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2017/05/29/asia/north-korea-missile-tests/index.html>

China Military. (2016, Juli 26). *China Releases Footage Concerning Ballistic Missile Defense System Test*. Dipetik April 10, 2018, dari http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-07/26/content_7174933.htm

Dong-A Ilbo. (2017, November 11). *Moon, Xi to Hold Second Summit in Vietnam*. Dipetik April 15, 2018, dari <http://english.donga.com/Home/3/all/26/1123762/1>

Easley, L.-E. (2017, November 13). *China's Charm Offensive on South Korea Is Starting to Work*. Dipetik Desember 17, 2018, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/11/13/chinas-charm-offensive-on-south-korea-is-starting-to-work/>

- Independent. (2017, November 24). *China Shuts Main Route Into North Korea as Nuclear Tensions Dominate Region*. Dipetik April 15, 2018, dari <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-crisis-latest-china-shuts-main-bridge-nuclear-tensions-kim-jong-un-a8073441.html>
- Institute for Security & Development Policy. (2017, Oktober). *THAAD on The Korean Peninsula*. Dipetik Februari 24, 2018, dari <http://isdp.eu/content/uploads/2016/11/THAAD-Backgrounder-ISDP-2.pdf>
- Lim, Y. S. (2017, November 3). *Cooperation with the US, Japan important to deal with tension with Pyongyang: South Korea's Moon*. Dipetik Juli 9, 2018, dari Channel News Asia: <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/cooperation-with-the-us-japan-important-to-deal-with-tension-9373348>
- McGuire, C. (2018, Februari 27). *China-South Korea Relations: A Delicate Détente*. Dipetik November 29, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/china-south-korea-relations-a-delicate-detente/>
- Meick, E., & Salidjanova, N. (2017). *China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications*. Washington DC: U.S.-China Economic and Security Review Commission. Dipetik April 10, 2018, dari https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report_China%27s%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20and%20its%20Implications.pdf
- Miller, S. (2018, November 30). *South Korean Youths Favor Unification with North*. Diambil kembali dari VOA News: <https://www.voanews.com/a/south-korean-youths-favor-unification-with-north/4680959.html>
- Panda, A. (2017, November 13). *China and South Korea: Examining the Resolution of the THAAD Impasse*. Dipetik April 30, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/11/china-and-south-korea-examining-the-resolution-of-the-thaad-impasse/>

- Panda, A. (2017, Desember 8). *South Korea's Moon Jae-in to Visit China Next Week*. Dipetik April 15, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/12/south-koreas-moon-jae-in-to-visit-china-next-week/>
- Park, B. S. (2017, November 2). *South Korea's "three no's" Announcement Key to Restoring Relations with China*. Dipetik November 2018, 2018, dari Hankyoreh: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/817213.html
- Perlez, J. (2017, Mei 31). *China Woos South Korea's New Leader, but the U.S. Left Behind a Spoiler*. Dipetik Desember 18, 2018, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/05/31/world/asia/china-south-korea-xi-jinping-moon-jaein-thaad.html>
- Seong, Y. C. (2017, November 4). *President Moon reiterates opposition to trilateral military alliance with US and Japan*. Dipetik Desember 17, 2018, dari Hankyoreh: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/817468.html
- Time. (2016, Agustus 29). *South Korea's Main Opposition Party 'Takes Stand Against THAAD*. Dipetik November 29, 2018, dari <http://time.com/4470154/south-north-korea-thaad-missiles-minjoo-party/>
- Weibing, L. (2017, November 14). *Chinese Premier Urges South Korea to Remove Obstacles in Bilateral Ties*. Dipetik April 15, 2018, dari Xinhuanet: http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/14/c_136749724.htm
- Yonhap News. (2017, November 3). *Moon Skeptical Over Trilateral Military Alliance with U.S., Japan*. Dipetik April 30, 2018, dari <http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/11/03/0301000000AEN20171103010200320.html>
- Zhou, L. (2016, Agustus 5). *Seoul's tilt towards Tokyo could lead to worst-case scenario for Beijing*. Dipetik Desember 16, 2018, dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1999331/seouls-tilt-towards-tokyo-could-lead-worst-case>